

BOLEHKAH GEREJA BERPOLITIK?

PERSPEKTIF TEOLOGIS DAN PRAKTIS



Dharma Leksana, S.Th., M.Si.

BOLEHKAH GEREJA BERPOLITIK?

Perspektif Teologis dan Praktis

Oleh: Dharma Leksana, S.Th., M.Si.

KATA PENGANTAR

Dalam dunia yang semakin kompleks, politik dan agama tak bisa lagi berdiri dalam sekat-sekat yang absolut. Banyak gereja hari ini ditarik dalam pusaran politik, baik secara sukarela maupun karena tekanan sosial. Buku ini lahir dari keprihatinan dan pencarian atas pertanyaan mendasar: *bolehkah gereja berpolitik?* Dengan pendekatan teologis, filosofis, dan praktis, buku ini mengajak pembaca untuk menelusuri ulang peran gereja di tengah realitas politik kontemporer, tanpa kehilangan integritas spiritualitas dan amanat kenabian.

DAFTAR ISI

1. **Pendahuluan: Menakar Ulang Relasi Gereja dan Politik**
2. **Memahami Politik: Antara Ideal, Kekuasaan, dan Moralitas**
3. **Apa dan Siapa Gereja? Dimensi Teologis dan Sosiologis**
4. **Politik dalam Alkitab: Narasi Kuasa dan Keadilan**
5. **Teologi Politik: Perspektif dari Para Teolog dan Pemikir Gereja**
6. **Argumen Teologis Pro-Keterlibatan Gereja dalam Politik**
7. **Argumen Teologis Anti-Keterlibatan Gereja dalam Politik Praktis**
8. **Pandangan Filsuf dan Tokoh Politik tentang Agama dan Negara**
9. **Risiko dan Bahaya Gereja dalam Pusaran Politik Kekuasaan**
10. **Model Keterlibatan Gereja: Politik Profetik dan Etika Sosial**
11. **Kasus Indonesia: Gereja, Demokrasi, dan Politik Identitas**
12. **Gereja di Dunia Global: Studi Kasus Amerika Latin, Afrika, dan Eropa Timur**
13. **Rekomendasi: Jalan Tengah antara Spiritualitas dan Advokasi Sosial**
14. **Kesimpulan: Gereja sebagai Hati Nurani Bangsa**
15. **Daftar Pustaka**
16. **Glosarium**

ULASAN MATERI BAB DEMI BAB (RINGKASAN)

1. Pendahuluan: Menakar Ulang Relasi Gereja dan Politik

Menjelaskan urgensi pembahasan, konflik konseptual antara agama dan politik, serta pentingnya membaca konteks zaman secara bijaksana.

2. Memahami Politik: Antara Ideal, Kekuasaan, dan Moralitas

Mengurai tiga dimensi politik:

- Politik ideal: Mengabdikan pada kebaikan bersama (*bonum commune*).
- Politik kekuasaan: Praktik dominasi, korupsi, dan dominasi elite.
- Politik moral: Upaya mengintegrasikan etika dan iman dalam proses politik.

Diperkuat oleh gagasan Aristoteles, Hannah Arendt, Max Weber, dan Alasdair MacIntyre.

3. Apa dan Siapa Gereja? Dimensi Teologis dan Sosiologis

- Gereja sebagai *ekklesia* (dipanggil keluar untuk menjadi saksi).
- Gereja institusional vs gereja persekutuan iman.
- Gereja sebagai aktor moral dalam masyarakat.

4. Politik dalam Alkitab: Narasi Kuasa dan Keadilan

- Musa dan pembebasan politis Israel (Eksodus).
- Nabi-nabi sebagai pengkritik kekuasaan (Yesaya, Amos).
- Yesus dan pernyataan politis simbolik (masuk Yerusalem, pengadilan, salib).
- Paulus dan tafsir politik dalam Roma 13.

5. Teologi Politik: Perspektif dari Para Teolog dan Pemikir Gereja

- **Augustinus:** *Civitas Dei* vs *Civitas Terrena*
- **Martin Luther:** Dua Kerajaan – sekular dan rohani
- **Dietrich Bonhoeffer:** Gereja yang membela yang tertindas
- **Jürgen Moltmann:** Harapan eskatologis dan keterlibatan dunia
- **John Howard Yoder:** Gereja sebagai komunitas alternatif politik

6. Argumen Teologis Pro-Keterlibatan Gereja dalam Politik

- Amanat agung sebagai mandat sosial (Mat. 28).
- Gereja profetik dalam melawan ketidakadilan.
- Peran gereja sebagai pelindung moralitas publik.

7. Argumen Teologis Anti-Keterlibatan Gereja dalam Politik Praktis

- Politik sebagai ranah duniawi (Yoh. 18:36).
- Kekhawatiran terhadap netralitas dan kesatuan umat.
- Risiko kooptasi gereja oleh elite politik.

8. Pandangan Filsuf dan Tokoh Politik tentang Agama dan Negara

- **Plato:** Filsuf-king sebagai pemimpin ideal.
- **Thomas Hobbes:** Negara sebagai Leviathan, agama dikontrol kekuasaan.
- **John Locke:** Toleransi agama dan pemisahan gereja-negara.
- **Karl Marx:** Agama sebagai alat opresi.
- **Habermas:** Agama harus hadir dalam ruang publik sebagai suara moral.

9. Risiko dan Bahaya Gereja dalam Pusaran Politik Kekuasaan

- Kooptasi dan hilangnya independensi gereja.
- Korupsi spiritual dan manipulasi identitas agama.
- Polarisasi internal umat.

10. Model Keterlibatan Gereja: Politik Profetik dan Etika Sosial

- Gereja sebagai pengingat moral dan bukan aktor partai.
- Keterlibatan gereja dalam advokasi HAM, pendidikan, dan anti-korupsi.
- Dialog lintas iman dan partisipasi publik tanpa afiliasi politik formal.

11. Kasus Indonesia: Gereja, Demokrasi, dan Politik Identitas

- Sejarah keterlibatan gereja dalam kemerdekaan RI.
- Peran PGI, KWI, dan ormas Kristen dalam demokrasi dan kebebasan beragama.
- Tantangan gereja dalam menghadapi politisasi agama dan diskriminasi minoritas.

12. Gereja di Dunia Global: Studi Kasus

- **Amerika Latin:** Teologi Pembebasan dan perjuangan rakyat.
- **Afrika Selatan:** Peran gereja dalam anti-apartheid (Desmond Tutu).
- **Eropa Timur:** Gereja melawan komunisme dan menumbuhkan demokrasi (Polandia, Rumania).

13. Rekomendasi: Jalan Tengah

- Gereja aktif dalam etika publik, bukan partai politik.
- Menjadi mitra kritis negara, bukan oposisi atau sekutu kekuasaan.
- Mendorong politik moral, etika publik, dan kebijakan berkeadilan.

14. Kesimpulan

Bab 1

Pendahuluan: Menakar Ulang Relasi Gereja dan Politik

Di tengah arus deras perdebatan publik dan kontestasi kekuasaan yang kerap kali memanas, pertanyaan "bolehkah gereja berpolitik?" tidak pernah kehilangan relevansinya. Pertanyaan ini bukan sekadar retorika, melainkan cerminan dari ketegangan panjang antara dua entitas besar: agama dan negara, gereja dan politik. Ketika gereja bersuara dalam isu publik, ia dipuji sebagai suara kenabian; tetapi ketika ia terlalu dekat dengan kekuasaan, ia dikhawatirkan kehilangan wibawa spiritualnya.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks di era demokrasi dan keterbukaan, di mana segala hal bersifat politis—termasuk iman. Gereja tidak lagi hidup dalam isolasi, melainkan dalam dunia yang saling terhubung, penuh ketegangan ideologis, ketimpangan sosial, serta problematika etika publik. Maka, pertanyaan pentingnya bukan hanya *bolehkah*, tetapi *bagaimana* gereja berpolitik—jika memang harus terlibat.

Gereja dan Negara: Sebuah Ketegangan Sejarah

Relasi antara gereja dan negara telah melalui berbagai babak sejarah: dari masa Konstantinus yang menggabungkan takhta dan altar, hingga era Reformasi yang menyerukan pemisahan kekuasaan spiritual dan politik. Dalam konteks Indonesia, hubungan gereja dan negara juga tidak tunggal: gereja pernah menjadi mitra perjuangan kemerdekaan, tetapi juga pernah menjadi sasaran kecurigaan ideologis di masa-masa genting politik.

Sejarah ini menunjukkan bahwa gereja tidak pernah benar-benar netral. Diamnya bisa menjadi tanda persetujuan, dan suaranya bisa menjadi tanda perlawanan. Maka, memilih untuk tidak berpolitik juga merupakan sikap politik.

Gereja: Antara Panggilan Spiritual dan Tanggung Jawab Sosial

Gereja dalam pengertian teologis adalah *ekklesia*, komunitas umat percaya yang dipanggil keluar dari dunia untuk menjadi terang bagi dunia itu sendiri. Panggilan ini tidak sekadar bersifat rohani atau liturgis, tetapi juga sosial dan etis. Dalam Matius 5:13-16, Yesus memanggil murid-murid-Nya untuk menjadi garam dan terang dunia—dua simbol yang hanya bermakna jika bersentuhan dengan dunia nyata yang penuh kerusakan dan kegelapan.

Oleh karena itu, pemisahan mutlak antara peran spiritual dan peran sosial tidak sejalan dengan gambaran gereja dalam Kitab Suci. Gereja tidak dipanggil untuk menghindari dunia, melainkan untuk menggarangi dan meneranginya—termasuk dunia politik.

Mengapa Pertanyaan Ini Perlu Diajukan Ulang Hari Ini?

Pertanyaan "bolehkah gereja berpolitik?" perlu ditinjau ulang karena beberapa alasan penting:

1. **Politik adalah Kenyataan yang Tak Terhindarkan.**
Dalam masyarakat modern, hampir semua aspek kehidupan—pendidikan, kesehatan, ekonomi, bahkan ibadah—berhubungan dengan kebijakan politik. Gereja tidak dapat menghindar dari realitas ini tanpa mengasingkan diri dari dunia yang ia layani.
2. **Bangkitnya Politik Identitas.**
Dalam banyak konteks, termasuk Indonesia, agama sering kali digunakan sebagai alat politik. Dalam situasi seperti ini, gereja dihadapkan pada dilema: diam dan membiarkan nilai-nilai spiritual dipolitisasi, atau bersuara dan dianggap partisan.
3. **Krisis Etika dalam Kepemimpinan Publik.**
Banyak negara menghadapi krisis moral dalam kepemimpinan politik: korupsi, intoleransi, manipulasi, hingga kekerasan. Dalam konteks ini, suara gereja dibutuhkan sebagai penyeimbang dan pengingat akan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kasih.
4. **Kebutuhan akan Politik Moral dan Profetik.**
Politik tidak harus kotor. Gereja bisa mendorong bentuk politik yang baru—politik moral—yang mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Ini bukan soal menjadi partai, tetapi menjadi nurani bangsa.

Pertanyaan Etis dan Teologis yang Mengemuka

Namun tentu saja, keterlibatan gereja dalam politik tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Banyak pertanyaan etis dan teologis muncul:

- Apakah gereja dapat berpolitik tanpa kehilangan otoritas spiritualnya?
- Bagaimana membedakan antara gereja yang menjadi nabi dan gereja yang menjadi alat kekuasaan?
- Apakah semua bentuk politik dapat diterima oleh gereja, atau hanya yang sesuai dengan prinsip Injil?

Buku ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara mendalam, dengan menelusuri berbagai sisi: dari konsep politik itu sendiri, pemahaman teologis tentang gereja, studi atas teks Alkitab, pandangan para filsuf dan teolog, serta analisis praktik nyata di berbagai konteks global dan lokal.

Menuju Pemahaman yang Lebih Seimbang

Bab-bab selanjutnya akan membawa pembaca pada refleksi yang lebih luas dan argumentatif. Di akhir buku ini, pembaca diharapkan mampu melihat bahwa pertanyaan "bolehkah gereja berpolitik?" bukanlah persoalan hitam-putih, tetapi medan refleksi yang kompleks, menuntut kebijaksanaan spiritual dan keberanian moral.

Dengan menyadari bahwa politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan medan perjuangan untuk mewujudkan *bonum commune*—kebaikan bersama—gereja dapat hadir secara bermakna, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai komunitas yang hidup dalam kasih, kebenaran, dan harapan.

“Politik itu penting terlalu besar untuk diserahkan sepenuhnya pada politisi.”
— Charles de Gaulle

Bab 2

Memahami Politik: Antara Ideal, Kekuasaan, dan Moralitas

Ketika mendengar kata "politik", sebagian besar orang akan langsung membayangkan intrik kekuasaan, janji kampanye yang dilupakan, atau perebutan jabatan. Namun benarkah politik hanya sebatas itu? Sebelum menilai apakah gereja boleh atau tidak boleh terlibat di dalamnya, kita perlu terlebih dahulu memahami hakikat politik itu sendiri.

2.1 Politik: Definisi dan Dinamika

Secara etimologis, kata “politik” berasal dari bahasa Yunani *polis* yang berarti kota atau negara-kota. Politik (*politike techne*) adalah seni mengatur kehidupan bersama di dalam suatu komunitas (*polis*). Aristoteles mendefinisikannya sebagai:

“Manusia adalah *zoon politikon*—makhluk politik—karena manusia hanya dapat menemukan aktualisasi dirinya dalam kehidupan bersama.”(*Aristoteles, Politics*)

Dengan demikian, politik pada dasarnya adalah seni dan ilmu mengatur hidup bersama demi mencapai *bonum commune* atau kebaikan bersama. Politik bukan sekadar urusan partai atau kekuasaan, melainkan proses mengelola perbedaan demi kesejahteraan bersama.

Namun dalam praktiknya, politik hadir dalam berbagai wajah: ideal, kekuasaan, dan moral. Ketiga dimensi ini akan menjadi dasar analisis kita dalam menilai sejauh mana gereja dapat bersinggungan dengan politik.

2.2 Politik Ideal: Cita-cita Kebaikan Bersama

Dalam pandangan filsuf klasik seperti Plato dan Aristoteles, politik ideal adalah upaya kolektif menuju kehidupan yang adil, sejahtera, dan beretika. Negara dalam visi Plato adalah komunitas yang terorganisir secara hierarkis di mana setiap warga memainkan peran sesuai kodratnya demi harmoni dan keadilan. Sementara Aristoteles melihat negara sebagai alat untuk mencapai *eudaimonia*—kebahagiaan manusia yang tertinggi.

Politik ideal adalah:

- Mewujudkan keadilan sosial
- Menjamin hak-hak warga negara
- Menyediakan kesejahteraan dasar
- Menjunjung tinggi nilai etika dalam pengambilan kebijakan

Sayangnya, politik seperti ini jarang kita jumpai dalam praktik sehari-hari.

2.3 Politik Kekuasaan: Realitas yang Sering Kali Pahit

Berbeda dengan politik ideal, realitas politik yang dominan hari ini lebih mendekati apa yang disebut *Realpolitik* atau *Machtpolitik*—politik kekuasaan. Tokoh seperti Niccolò Machiavelli, dalam bukunya *Il Principe*, menggambarkan bahwa politik adalah seni memanipulasi dan mempertahankan kekuasaan, dengan atau tanpa etika.

Dalam politik kekuasaan:

- Tujuan membenarkan cara
- Kekuasaan adalah nilai tertinggi
- Politik bersifat transaksional, oportunistik
- Moralitas kerap kali menjadi korban kompromi

Di sinilah letak krisis politik modern: ketika kekuasaan menjadi pusat gravitasi, bukan lagi kebaikan bersama. Politik kekuasaan menjadikan publik hanya sebagai alat atau angka suara, dan mengabaikan prinsip etika yang seharusnya menjadi fondasinya.

2.4 Politik Moral: Jalan Tengah yang Membebaskan

Di tengah dua kutub tersebut, muncul wacana tentang *politik moral*—sebuah upaya mengembalikan politik ke dalam pangkuan nilai-nilai etis dan spiritual.

Politik moral bukanlah politik "orang suci", melainkan politik yang berupaya menjadikan kejujuran, keadilan, kasih, dan pelayanan sebagai prinsip dasar pengambilan keputusan publik.

Beberapa tokoh yang mengusung politik moral:

- **Martin Luther King Jr.:** Menggunakan kekuatan moral agama untuk mengubah kebijakan diskriminatif melalui gerakan non-kekerasan.
- **Gus Dur (Abdurrahman Wahid):** Mengajarkan bahwa politik harus berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman.
- **Desmond Tutu:** Mengintegrasikan perjuangan hak asasi manusia dengan nilai-nilai iman Kristen.

Politik moral menjadi jalan tengah yang tidak meninggalkan realitas, tetapi juga tidak larut dalam pragmatisme. Ia menjadi wadah untuk memengaruhi struktur kekuasaan tanpa harus menjadi bagian dari praktik politik yang korup.

2.5 Politik dalam Pandangan Alkitab

Alkitab tidak membahas politik secara sistematis seperti filsuf Yunani. Namun berbagai narasi dalam Perjanjian Lama dan Baru menunjukkan dinamika yang sangat politis:

- **Yusuf di Mesir** (Kejadian 41): Seorang tokoh Ibrani menjadi pejabat tinggi dalam kerajaan kafir demi menyelamatkan bangsanya dari kelaparan.
- **Musa di Mesir** (Keluaran): Memimpin gerakan pembebasan dari tirani politik Firaun— bentuk paling awal dari pembelaan atas hak asasi manusia.
- **Yesus dan Kaisar** (Matius 22:21): “Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah.” Sebuah pernyataan yang menandai batas, namun juga relasi antara kekuasaan duniawi dan kuasa ilahi.
- **Paulus dan Pemerintahan Roma** (Roma 13): Menyarankan agar umat tunduk kepada pemerintah, karena semua otoritas berasal dari Allah. Namun di saat lain, Paulus juga berani menuntut keadilan sebagai warga negara Roma.

Artinya, politik dalam Alkitab diwarnai oleh dua pendekatan: **pengakuan atas struktur kekuasaan**, dan **panggilan untuk mengoreksi ketika kekuasaan menyimpang dari keadilan**. Gereja hari ini tidak bisa hanya memegang satu sisi.

2.6 Relasi Etika dan Kekuasaan: Mungkinkah Politik Kudus?

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: mungkinkah kekuasaan dan kekudusan bersatu? Bisakah politik menjadi arena pengudusan hidup?

Filsuf kontemporer seperti **Jürgen Habermas** berbicara tentang pentingnya *discourse ethics*—di mana ruang publik harus menjadi arena dialog rasional dan terbuka, bukan dominasi. Dalam konteks ini, gereja bisa menjadi pelaku aktif dalam *politik deliberatif*, bukan sebagai kekuatan dominan, melainkan sebagai suara yang berkontribusi atas dasar moral dan iman.

Di sinilah teologi politik menjadi penting: bukan sekadar membahas soal partai atau jabatan, tetapi bagaimana iman menggerakkan gereja untuk mengubah dunia secara struktural melalui nilai-nilai kerajaan Allah: kasih, kebenaran, dan keadilan.

2.7 Menuju Politik yang Dibebaskan dari Kuasa Dosa

Politik sebagai ciptaan Tuhan seharusnya baik. Tetapi politik, seperti semua aspek dunia, telah tercemar oleh dosa struktural: keserakahan, ketidakadilan, korupsi. Maka tugas gereja bukan menjauhi politik, tetapi menebusnya.

Gereja dipanggil untuk menghidupi *politik kasih*, yakni politik yang berani berdiri bagi yang tertindas, menegur kekuasaan yang menyimpang, dan memuliakan Tuhan melalui kebijakan yang adil dan beradab.

“Tujuan politik yang sejati bukanlah kekuasaan, melainkan pelayanan; bukan dominasi, melainkan pengabdian pada keadilan.”
— Desmond Tutu

Setelah memahami kompleksitas wajah politik—ideal, kekuasaan, dan moral—kita kini siap menjawab pertanyaan berikutnya: *Apakah gereja, sebagai institusi rohani dan sosial, boleh terlibat dalam politik?* Bab berikutnya akan menyajikan dasar teologis dari kedua kubu—yang menolak dan yang mendukung keterlibatan gereja dalam dunia politik.

Bab 3

Gereja dan Politik: Telaah Teologis dan Historis

Pertanyaan “bolehkah gereja berpolitik?” tidak akan pernah cukup dijawab hanya dengan opini moral atau ide umum. Pertanyaan ini perlu diselidiki dari dua ranah utama: **teologi** dan **sejarah gereja**. Gereja bukan entitas netral-hampa; ia tumbuh dalam sejarah, menyuarakan iman dalam konteks sosial-politik tertentu. Maka keterlibatan atau ketidakterlibatannya dalam politik pun tak bisa dilepaskan dari pertimbangan iman dan pengalaman sejarah.

3.1 Teologi Politik: Apakah Tuhan Berpolitik?

Teologi politik adalah cabang teologi yang mengkaji relasi antara kekuasaan, masyarakat, dan iman. Pertanyaan dasarnya adalah: apakah Allah peduli dengan politik manusia? Jawabannya tergantung pada bagaimana kita memahami **Kerajaan Allah**.

Dalam teologi Yesus, Kerajaan Allah bukan hanya realitas spiritual, tetapi juga realitas sosial. Ketika Yesus berkata, "Kerajaan Allah sudah dekat" (Markus 1:15), Ia sedang menyatakan transformasi menyeluruh—termasuk struktur sosial yang timpang. Ia menyembuhkan, memberi makan orang lapar, dan menantang kemapanan religius dan politis.

Dengan demikian, **Allah tidak anti-politik**, justru menuntut politik yang mencerminkan keadilan ilahi.

“Jika Allah bukan Tuhan atas seluruh kehidupan, maka Ia bukan Tuhan sama sekali.”
— Abraham Kuyper, teolog Reformed Belanda

3.2 Dua Pandangan Teologis tentang Keterlibatan Politik Gereja

Dalam sejarah pemikiran Kristen, terdapat dua arus utama mengenai apakah gereja boleh berpolitik:

A. Gereja Sebagai Komunitas Eskatologis (Apologetik-Spiritualis)

Ditekankan oleh tokoh-tokoh seperti **Tertullian**, **Augustinus**, dan sebagian tradisi Pietistik, pandangan ini menekankan bahwa gereja adalah *civitas Dei* (kota Allah), yang berdiri kontras dengan *civitas terrena* (kota dunia).

- Fokus gereja adalah menyelamatkan jiwa, bukan mengatur negara.
- Dunia adalah sementara; keterlibatan politik bisa mencemari kemurnian gereja.
- Politik dipandang sebagai wilayah kekuasaan yang seringkali bertentangan dengan nilai Injil.

Ini bukan pandangan yang apatis, tapi lebih bersifat eskapis—percaya bahwa perubahan sejati hanya akan terjadi ketika Kristus datang kembali.

B. Gereja sebagai Komunitas Profetik (Transformatif-Inkarnasional)

Dipengaruhi oleh **Martin Luther King Jr.**, **Dietrich Bonhoeffer**, dan juga **Liberation Theology** (Teologi Pembebasan), pandangan ini menyatakan bahwa:

- Gereja harus menyuarakan keadilan dan kebenaran dalam ruang publik.
- Iman yang tidak menyentuh struktur ketidakadilan sosial adalah iman yang mandul.
- Gereja harus menjadi *gereja profetik*—mengkritik sistem yang korup, berdiri bersama kaum lemah.

Teologi ini menekankan bahwa **Yesus Kristus tidak hanya menyelamatkan jiwa, tetapi juga mengkonfrontasi struktur dosa sosial.**

“Ketika gereja diam terhadap kejahatan, ia telah bersekutu dengannya.”
— Dietrich Bonhoeffer

3.3 Sejarah Keterlibatan Gereja dalam Politik

A. Gereja Perdana dan Kekaisaran Roma

Gereja awal hidup di bawah tekanan politik dan penganiayaan. Mereka bukan entitas politik aktif, tetapi tidak pula tunduk secara mutlak pada kekuasaan. Ketika Kaisar menyatakan dirinya ilahi, para pengikut Kristus menolak sembah sujud, karena “Yesus adalah Tuhan”—pernyataan yang secara politis subversif.

Dengan kata lain, walau tanpa senjata, gereja perdana **melawan hegemoni kekuasaan absolut** dengan iman mereka.

B. Konstantin dan Era Kristendom

Pada abad ke-4, Kaisar Konstantinus menjadikan Kekristenan sebagai agama resmi negara. Inilah awal dari hubungan mesra antara gereja dan negara.

Dampaknya:

- Gereja memperoleh kekuasaan dan privilese politik.

- Namun, gereja juga kehilangan suara kritis dan dimanfaatkan oleh penguasa.

Inilah babak awal dari **politik kekuasaan gereja**—di mana posisi spiritual digunakan untuk legitimasi kekuasaan duniawi.

C. Reformasi: Pemisahan dan Ketegangan Baru

Reformasi Protestan menegaskan kembali otoritas Alkitab dan menjungkirbalikkan struktur hirarkis gereja-negara. Namun, Martin Luther juga menyerukan ketaatan kepada otoritas politik, bahkan terhadap kekuasaan yang tidak adil, sejauh itu tidak melanggar iman.

Sementara **John Calvin** di Jenewa menciptakan sistem pemerintahan Kristen teokratis yang cukup politis, menunjukkan bahwa **reformasi pun tetap memperdebatkan peran gereja dalam kekuasaan**.

D. Gereja di Era Kolonial dan Kemerdekaan

Di berbagai negara jajahan, gereja sering kali ambivalen—di satu sisi melayani rakyat tertindas, di sisi lain bekerja sama dengan penguasa kolonial. Namun, banyak tokoh gereja juga menjadi pionir kemerdekaan, seperti di Afrika Selatan, Amerika Latin, bahkan Indonesia.

Di Indonesia, tokoh seperti **dr. Johannes Leimena**, seorang Kristen Protestan, aktif dalam perjuangan nasional dan pemerintahan tanpa meninggalkan identitas rohaninya.

3.4 Politik Gereja atau Gereja yang Berpolitik?

Perlu dibedakan antara:

- **Gereja yang menjadi alat politik** (praktik yang rawan manipulasi)
- **Gereja yang berpolitik secara profetik** (berdiri atas nilai-nilai Injil)

Gereja tidak dipanggil untuk **menjadi partai politik**, tetapi dipanggil untuk **menjadi nabi di tengah masyarakat**.

Keterlibatan gereja dalam politik haruslah:

- **Transparan dan etis**
- **Bebas dari kepentingan partisan**
- **Mewakili suara keadilan, bukan kekuasaan**

“Tugas gereja bukan mengontrol negara, tapi mengoreksinya. Bukan merebut kursi kekuasaan, tapi menyuarakan suara nurani.”

— Stanley Hauerwas

3.5 Tantangan Gereja Masa Kini: Antara Profetik dan Populis

Di era demokrasi elektoral dan media sosial, banyak gereja tergoda masuk dalam ranah politik praktis secara langsung: mendukung calon, menciptakan blok politik agama, bahkan menjadi kendaraan partai tertentu.

Risikonya:

- Kehilangan integritas moral
- Memecah belah umat
- Menjadi alat elite kekuasaan

Sebaliknya, gereja yang sepenuhnya pasif juga gagal menjadi saksi Kristus di dunia yang penuh ketidakadilan.

Di sinilah perlunya **keseimbangan: Gereja tidak memihak partai, tapi memihak kebenaran dan keadilan.**

Kesimpulan Sementara

Sejarah dan teologi mengajarkan bahwa gereja tidak bisa menghindari politik, karena iman Kristen bersentuhan dengan kenyataan hidup manusia. Namun keterlibatan itu bukan dalam bentuk kekuasaan praktis, melainkan dalam bentuk profetik yang:

- Kritis terhadap ketidakadilan
- Setia kepada nilai Injil
- Aktif dalam membela mereka yang lemah

Keterlibatan gereja dalam politik bukanlah soal apakah “boleh atau tidak”, melainkan “bagaimana dan untuk siapa”.

“Ketika gereja tidak bersuara dalam menghadapi ketidakadilan, ia sedang memihak penindas.”
— Martin Luther King Jr.

Bab 4

Pro dan Kontra Keterlibatan Gereja dalam Politik Praktis

Setelah menelusuri akar teologis dan jejak historis relasi antara gereja dan politik, kita tiba pada titik kritis: **bagaimana posisi gereja di era demokrasi modern yang sangat politis dan penuh dinamika kepentingan?** Haruskah gereja terlibat dalam politik praktis secara langsung? Atau sebaiknya menjaga jarak agar tetap netral dan murni secara spiritual?

Pertanyaan ini telah membelah pandangan para teolog, rohaniwan, dan umat Kristen itu sendiri ke dalam dua kutub: **pro** dan **kontra** keterlibatan gereja dalam politik praktis. Bab ini akan mengulas secara mendalam kedua posisi tersebut, dengan tetap mempertimbangkan konteks realitas Indonesia.

4.1 Argumen yang Mendukung Keterlibatan Gereja dalam Politik Praktis

A. Amanat Agung sebagai Mandat Transformasi Sosial

Matius 28:19-20 memberikan mandat kepada gereja untuk "menjadikan semua bangsa murid." Ini bukan sekadar perintah untuk menginjili secara spiritual, melainkan mencakup dimensi **penggaraman dunia**. Dalam Matius 5:13-16, Yesus berkata bahwa kita adalah "garam dan terang dunia". Artinya, gereja punya peran aktif di ruang publik, termasuk politik.

“Gereja bukan hanya agen keselamatan spiritual, tetapi juga alat transformasi sosial.”

— N. T. Wright

B. Politik sebagai Arena Pelayanan Publik

Gereja dipanggil untuk melayani, dan politik adalah salah satu medan pelayanan paling strategis untuk memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan umum (*bonum commune*). Tokoh-tokoh seperti **Desmond Tutu** dan **Martin Luther King Jr.** menunjukkan bahwa politik dapat menjadi instrumen kasih Allah.

C. Kebutuhan Akan Moralitas dalam Politik

Di tengah krisis integritas yang melanda politik, gereja dipandang sebagai penjaga moral publik. Ketika politisi gagal menjaga akhlak, gereja hadir sebagai suara hati nurani bangsa. Keterlibatan dalam politik memungkinkan gereja menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kasih di arena kekuasaan.

D. Praktik di Negara Demokrasi

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Ini mencakup warga gereja. Melarang gereja atau warganya berpolitik berarti melanggar prinsip demokrasi dan hak sipil. Selain itu, banyak politisi Kristen yang terbukti membawa perubahan positif tanpa meninggalkan iman mereka.

“Jika orang jahat masuk ke politik dan orang baik menjauh, maka kejahatan akan menang tanpa perlawanan.”
— Plato

4.2 Argumen yang Menolak Keterlibatan Gereja dalam Politik Praktis

A. Bahaya Kontaminasi Kekuasaan

Politik praktis sering kali bersifat transaksional, penuh kompromi, dan cenderung koruptif. Gereja yang masuk terlalu jauh ke dalamnya **berisiko mengorbankan integritas spiritual demi kepentingan duniawi.**

“Jangan campuradukkan altar dengan singgasana.”
— Roger Williams, pendiri Baptis Amerika

B. Risiko Perpecahan Jemaat

Ketika gereja mendukung calon atau partai tertentu, ada potensi besar jemaat terbelah secara politis. Hal ini bisa mengganggu kesatuan tubuh Kristus, memicu konflik internal, dan mengerdilkan gereja menjadi “klub politik” yang partisan, bukan rumah rohani yang inklusif.

C. Panggilan Utama Gereja adalah Rohani

Tugas utama gereja adalah memberitakan Injil dan membentuk murid Kristus. Terlalu fokus pada politik bisa membuat gereja kehilangan misi utamanya. Teolog konservatif seperti **John MacArthur** menekankan pentingnya gereja untuk “tidak mencampuri urusan politik dunia yang bersifat fana.”

D. Potensi Manipulasi oleh Penguasa

Gereja yang terlibat dalam politik praktis bisa saja dimanfaatkan oleh elite politik sebagai alat legitimasi. Sejarah mencatat bagaimana rezim-rezim otoriter sering memanipulasi gereja untuk menjustifikasi kebijakannya. Ketika gereja terlalu dekat dengan kekuasaan, maka suara kenabiannya bisa tumpul.

“Gereja yang duduk di pangkuan kekuasaan akan kehilangan kemampuannya untuk menegur.”
— Reinhold Niebuhr

4.3 Studi Kasus: Gereja di Indonesia

Di Indonesia, keterlibatan gereja dalam politik praktis kerap menimbulkan dilema. Di satu sisi, gereja minoritas ingin memastikan perlindungan hak-haknya, dan merasa perlu bersuara di ruang publik. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran akan munculnya cap “gereja partisan” atau bahkan “gereja oposisi”.

Beberapa kasus relevan:

- **Pemilu dan Dukungan Terbuka:** Sejumlah gereja dan sinode pernah secara terbuka mendukung calon tertentu. Hal ini memicu kontroversi karena dianggap mencederai netralitas spiritual.
- **Isu RUU dan Kebijakan Publik:** Di beberapa momen, gereja turut memberikan sikap terhadap undang-undang atau kebijakan negara, terutama yang berdampak pada kebebasan beragama. Ini adalah bentuk **politik nilai**, bukan politik kekuasaan.
- **Peran Tokoh Kristen dalam Pemerintahan:** Tokoh seperti **Johannes Leimena, Jakob Oetama**, atau **Basuki Tjahaja Purnama** menunjukkan bahwa orang Kristen dapat berkiprah di ranah politik tanpa meninggalkan iman mereka.

4.4 Jalan Tengah: Politik Nilai dan Kritis Profetik

Daripada terjebak pada dikotomi “boleh/tidak boleh”, lebih konstruktif bila gereja memosisikan diri sebagai:

- **Pewarta nilai-nilai Injil di ruang publik**
- **Penjaga nurani bangsa yang tidak partisan**
- **Mitra kritis pemerintah, bukan alat kekuasaan**
- **Pelayan rakyat, bukan pencari kuasa**

Dalam arti ini, gereja **berpolitik secara etis dan profetik**, tanpa harus menjadi aktor politik praktis.

“Gereja tidak harus menjadi partai politik, tetapi harus menjadi hati nurani politik.”
— Jim Wallis

Kesimpulan Sementara

Pro dan kontra keterlibatan gereja dalam politik praktis harus dipahami dalam kerangka misi gereja, bukan dalam semangat partisan. Yang dipertanyakan bukan semata-mata “boleh atau tidak”, tetapi lebih dalam: **apa motivasi, bentuk, dan dampaknya bagi kesaksian Injil?**

Keterlibatan politik bisa menjadi sarana kasih dan keadilan, tapi juga bisa menjadi jebakan kompromi dan pembelahan. Oleh sebab itu, gereja ditantang untuk **mengembangkan politik moral, bukan politik kekuasaan; politik kasih, bukan politik identitas.**

Bab 5

Politik sebagai Arena Kesaksian Injil dan Pelayanan Profetik

Gereja dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia (Kisah Para Rasul 1:8). Panggilan ini tidak terbatas pada ruang ibadah atau kegiatan spiritual semata, tetapi juga mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk bidang sosial, budaya, ekonomi, dan tentu saja—politik. Jika politik adalah ruang pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi hidup banyak orang, maka **politik adalah salah satu medan penting untuk kesaksian Injil dan pelayanan profetik gereja.**

Bab ini akan membahas bagaimana gereja dapat hadir di ranah politik tanpa kehilangan identitasnya sebagai tubuh Kristus. Kita akan melihat politik bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai **ladang pelayanan yang strategis dan transformatif**, dengan semangat kenabian dan kasih.

5.1 Injil yang Holistik: Lebih dari Keselamatan Pribadi

Pemahaman Injil yang sempit—terbatas pada keselamatan jiwa secara personal dan hidup setelah mati—telah lama dikritik oleh teolog-teolog kontemporer. Sebaliknya, **teologi Injil holistik** (whole gospel theology) melihat bahwa karya keselamatan Kristus mencakup:

- Pembaruan pribadi (justifikasi dan pertobatan),
- Rekonsiliasi sosial (damai dan keadilan antar manusia),
- Keadilan struktural (transformasi sistem yang menindas),
- Pemulihan ciptaan (ekologi dan keberlanjutan).

“Keselamatan adalah proyek Allah bagi seluruh ciptaan, bukan sekadar pelarian jiwa dari dunia.”
— Gustavo Gutiérrez, bapak *teologi pembebasan*

Dalam kerangka ini, keterlibatan politik menjadi bagian dari misi gereja untuk **menyatakan Kerajaan Allah** dalam realitas sehari-hari. Politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi arena di mana kasih, keadilan, dan belas kasih Allah diperjuangkan secara nyata.

5.2 Gereja sebagai Komunitas Profetik

Dalam Perjanjian Lama, para nabi memainkan peran penting dalam **mengkritisi ketidakadilan, mengingatkan para raja, dan menyerukan pertobatan sosial**. Mereka tidak diam terhadap

penindasan, korupsi, dan ketimpangan. Nabi Yesaya, Yeremia, Amos, Mikha—semuanya membawa suara Tuhan ke dalam pusat kekuasaan.

Gereja, dalam semangat profetik itu, dipanggil untuk:

- **Menjadi suara bagi yang tak bersuara (voiceless),**
- **Menyuarakan keadilan bagi yang tertindas,**
- **Mengkritisi sistem yang merusak martabat manusia,**
- **Mendampingi korban ketidakadilan politik dan ekonomi.**

“Kita tidak dapat memisahkan cinta kepada Allah dari panggilan untuk mengubah struktur yang menindas manusia.”

— Leonardo Boff, teolog Katolik Brasil

Pelayanan profetik gereja harus membebaskan, bukan membelenggu; memberdayakan, bukan melanggengkan dominasi.

5.3 Politik sebagai Kesaksian: Bukan Partisan, Tetapi Nilai

Gereja harus **berpolitik tanpa menjadi partisan**. Maksudnya, gereja tidak perlu mendukung partai atau calon tertentu, tetapi **menanamkan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam diskursus dan kebijakan publik**. Dalam hal ini, gereja berfungsi sebagai:

- **Sumber etika publik,**
- **Katalisator rekonsiliasi politik,**
- **Penggerak kesadaran moral bangsa,**
- **Pemantau kekuasaan yang berani mengkritik dan mendoakan.**

Tokoh seperti **Dietrich Bonhoeffer**, yang melawan rezim Nazi demi iman dan integritas Injil, adalah contoh nyata bahwa kesaksian di arena politik bisa berbiaya mahal, namun mulia.

5.4 Teladan Kristus: Mengubah Dunia Tanpa Takhta

Yesus Kristus sendiri tidak mendirikan partai atau merebut kekuasaan politik, namun **kehadiran-Nya adalah ancaman bagi struktur kuasa yang menindas**. Ia menyapa perempuan, menyembuhkan orang sakit, membela yang miskin, dan mengguncang tatanan sosial yang korup. Ia adalah **Mesias yang menolak kekerasan dan memimpin dengan teladan kasih**.

“Kerajaan Allah datang bukan melalui pedang atau jabatan, tetapi melalui salib.”

— Jurgen Moltmann, *The Crucified God*

Dengan demikian, pelayanan politik gereja harus meneladani Kristus: **berorientasi pada pelayanan, bukan dominasi; pada salib, bukan mahkota.**

5.5 Tantangan dan Risiko: Menjaga Integritas dalam Pelayanan Politik

Meski politik adalah ladang kesaksian, gereja harus selalu waspada terhadap jebakan:

- **Mencari pengaruh demi ambisi duniawi,**
- **Berkompromi demi akses kekuasaan,**
- **Menjadi alat legitimasi elite politik.**

Gereja harus membangun **etik pelayanan politik** yang kuat: berakar pada Injil, berpihak pada yang lemah, dan setia pada suara hati nurani. Keterlibatan politik gereja harus **menginspirasi perubahan, bukan menyulut perpecahan.**

5.6 Model Pelayanan Politik Gereja di Indonesia

Beberapa bentuk pelayanan politik yang dapat dilakukan gereja di Indonesia secara praktis:

- **Pendidikan politik warga jemaat,** agar tidak buta terhadap hak-hak demokratisnya.
 - **Advokasi kebijakan publik,** terkait isu HAM, lingkungan, pendidikan, dan kebebasan beragama.
 - **Dialog lintas iman dan politik,** sebagai bentuk kesaksian damai dan rekonsiliasi.
 - **Mendukung kader Kristen yang bersih, berintegritas, dan memiliki visi pelayanan.**
 - **Mengembangkan teologi publik** sebagai landasan reflektif dan tindakan.
-

Kesimpulan Bab 5: Mewartakan Injil di Panggung Politik

Politik bukan medan najis yang harus dihindari, tetapi salah satu tempat paling mendesak untuk menyatakan **kehadiran Allah di tengah dunia yang penuh luka.** Gereja yang menyadari misinya sebagai saksi Kristus tidak akan tinggal diam terhadap ketidakadilan dan penindasan struktural.

Melalui pelayanan profetik dan kesaksian yang etis, gereja dapat menjadi terang di ruang publik—**bukan karena kekuatan politis, tetapi karena kekuatan kasih, kebenaran, dan keberanian moral.**

Bab 6

Politik Identitas, Politisasi Agama, dan Tantangan Gereja Masa Kini

Di era pascareformasi, Indonesia menyaksikan lonjakan intensitas penggunaan agama dalam politik. Fenomena ini dikenal sebagai **politik identitas**—yakni praktik menjadikan identitas primordial seperti agama, etnis, atau budaya sebagai dasar mobilisasi politik. Agama, yang seharusnya menjadi perekat moral dan spiritual, berubah menjadi alat politisasi demi kepentingan kekuasaan.

Bab ini menelaah dinamika politik identitas dan politisasi agama yang sedang melanda Indonesia dan bagaimana gereja, sebagai institusi keagamaan sekaligus agen moral publik, menghadapi tantangan ini dengan bijak dan profetik.

6.1 Definisi dan Akar Politik Identitas

Politik identitas adalah strategi politik yang menekankan perbedaan identitas kelompok (agama, etnis, budaya) untuk mendapatkan dukungan atau kekuasaan. Dalam konteks agama, politik identitas seringkali menjelma dalam bentuk:

- Penggunaan simbol dan narasi agama untuk kampanye,
- Polarisasi antara “kita” vs “mereka”,
- Pengaburan batas antara iman dan kekuasaan,
- Eksklusi terhadap minoritas agama atau denominasi lain.

Menurut **Francis Fukuyama** dalam *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment* (2018), politik identitas muncul ketika kelompok merasa identitas mereka terancam atau tidak diakui secara adil. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi lebih kompleks karena faktor sejarah kolonial, politik Orde Baru, dan kemunculan media sosial yang memperkuat gelembung identitas.

6.2 Politisasi Agama: Ketika Iman Diperalat Kekuasaan

Politisasi agama adalah praktik menggunakan agama secara instrumental untuk meraih kekuasaan atau legitimasi politik. Ini berbahaya karena dapat:

- **Mengaburkan misi keagamaan** yang murni menjadi alat propaganda,
- **Menciptakan konflik horizontal** antar pemeluk agama atau denominasi,
- **Memicu intoleransi dan kekerasan berbasis agama**,
- **Merusak kesaksian iman** karena agama dijadikan komoditas politik.

“Ketika agama kehilangan otoritas moralnya dan tunduk pada kepentingan pragmatis, maka yang tersisa hanyalah simbol kosong tanpa daya transformatif.”
— Paul Tillich, teolog eksistensial

Dalam sejarah Indonesia, kasus-kasus seperti Pilkada DKI 2017 menjadi contoh konkret bagaimana agama dapat diseret ke medan konflik politik identitas, menimbulkan luka sosial yang dalam dan mengancam kohesi bangsa.

6.3 Tantangan Gereja: Menjadi Penjaga Integritas Iman dan Demokrasi

Gereja menghadapi dilema besar: **Bagaimana bersuara dalam ruang publik tanpa terseret dalam politik identitas dan politisasi agama?** Tantangannya mencakup:

- **Tekanan untuk berpihak pada kekuatan politik tertentu** demi perlindungan atau pengaruh,
- **Godaan menjadi mayoritarian dalam wilayah tertentu**, sehingga menindas minoritas lain,
- **Kebingungan umat terhadap perbedaan antara pelayanan sosial-politik dan politik praktis**,
- **Fragmentasi internal** karena perbedaan pandangan politik antar jemaat.

Gereja harus belajar **memisahkan antara tanggung jawab moral dan aktivisme partisan**. Keterlibatan sosial-politik adalah keharusan profetik, tetapi afiliasi partisan harus dihindari demi menjaga kesaksian dan netralitas profetik.

6.4 Strategi Gereja Menghadapi Politik Identitas

Beberapa strategi yang dapat diterapkan gereja dalam merespons politik identitas:

1. **Membangun teologi publik yang inklusif** — teologi yang menjembatani iman dan ruang publik dengan landasan kasih, keadilan, dan rekonsiliasi.
2. **Pendidikan politik etis bagi warga gereja** — membekali jemaat agar tidak mudah terprovokasi isu SARA dan mampu memilih pemimpin berdasarkan kualitas, bukan identitas sempit.
3. **Mendorong dialog lintas iman dan denominasi** — untuk meredam sektarianisme dan menciptakan ruang publik yang damai.
4. **Menjaga integritas mimbar** — agar tidak digunakan untuk propaganda kekuasaan, tetapi menjadi ruang penyadaran moral dan spiritual.
5. **Meneladani tokoh lintas zaman** yang berani menjaga iman sekaligus memperjuangkan demokrasi dan pluralitas, seperti Nelson Mandela, Desmond Tutu, dan Gus Dur.

6.5 Gereja Sebagai Penjaga Kebhinekaan

Indonesia dibangun di atas fondasi **Bhinneka Tunggal Ika**. Dalam konteks ini, gereja bukan hanya komunitas iman, tetapi juga bagian dari warga bangsa yang punya tanggung jawab untuk menjaga pluralitas dan keutuhan sosial.

Sebagai penjaga kebhinekaan, gereja harus:

- **Menolak retorika keagamaan yang diskriminatif,**
- **Membela minoritas yang tertindas,**
- **Mempromosikan narasi kasih lintas agama,**
- **Menjadi tempat aman bagi semua kalangan, terlepas dari afiliasi politiknya.**

“Gereja tidak hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dunia yang terluka.”
— Emil Brunner, teolog Reformed Swiss

Kesimpulan Bab 6: Melawan Politisasi dengan Profetisme

Gereja tidak bisa diam ketika agama dijadikan alat kekuasaan. Di tengah derasnya arus politik identitas, gereja dipanggil untuk **menjadi suara kasih dan akal sehat**. Gereja harus mampu melihat melampaui retorika kelompok dan tetap berdiri di atas nilai-nilai Kerajaan Allah—keadilan, kebenaran, dan belas kasih.

Dengan menyadari panggilan profetiknya, gereja dapat berkontribusi dalam membangun demokrasi yang sehat, masyarakat yang damai, dan iman yang tidak diperjualbelikan.

Bab 7

Etika Politik Kristen: Menavigasi Kuasa dengan Iman

Gereja tidak bisa menghindari kenyataan bahwa politik adalah bagian dari kehidupan publik yang turut memengaruhi kesejahteraan dan keadilan sosial. Namun, saat kekuasaan dan iman bersinggungan, muncul pertanyaan penting: **bagaimana orang Kristen dan gereja seharusnya bersikap terhadap kekuasaan?** Di sinilah peran **etika politik Kristen** menjadi vital.

Etika politik Kristen adalah refleksi moral dan spiritual yang membimbing keterlibatan orang percaya dalam politik berdasarkan prinsip-prinsip iman Injili. Etika ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan agama sebagai penguasa, tetapi untuk **menjadi suara kenabian dan pelayan keadilan** dalam ruang publik.

7.1 Pengantar: Kekuasaan dalam Perspektif Alkitab

Dalam Alkitab, kekuasaan bukanlah sesuatu yang jahat secara inheren. Allah sendiri adalah sumber segala otoritas (Roma 13:1). Namun, Alkitab juga menunjukkan bahwa kekuasaan manusia sering disalahgunakan. Raja-raja Israel dan Yehuda yang menyimpang dari hukum Tuhan menjadi bukti bahwa kekuasaan tanpa moral adalah bencana.

Yesus Kristus memberikan paradigma baru tentang kekuasaan: **kuasa untuk melayani, bukan menguasai**. Dalam Markus 10:45, Yesus berkata:

“Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawa-Nya...”

Paradigma ini menjadi dasar etika Kristen dalam berpolitik: kekuasaan dipakai untuk pelayanan kasih, keadilan, dan pembebasan, bukan dominasi.

7.2 Prinsip-Prinsip Etika Politik Kristen

Berikut adalah prinsip-prinsip utama etika politik dalam perspektif Kristen:

a. Keadilan (Justice)

Etika politik Kristen berpihak pada keadilan sebagai refleksi dari karakter Allah yang adil (Mikha 6:8). Gereja dan warga Kristen dipanggil untuk memperjuangkan keadilan bagi semua, terutama bagi yang tertindas dan marginal.

b. Kebenaran (Truth)

Dalam dunia politik yang sering diwarnai manipulasi dan hoaks, etika Kristen menekankan integritas dan kejujuran. Politik harus dibangun di atas komitmen pada kebenaran, bukan kepentingan sesaat.

c. Kasih (Love/Agape)

Kasih menjadi etika tertinggi dalam Kekristenan. Dalam politik, kasih mengarahkan kita untuk melihat lawan politik bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sesama ciptaan Allah. Politik kasih tidak membenci, tetapi membangun dan merangkul.

d. Pelayanan (Diakonia)

Kekuasaan bukan untuk diri sendiri, melainkan sebagai alat pelayanan. Pemimpin Kristen harus meneladani Kristus dalam melayani, bukan memperkaya diri. Ini bertolak belakang dengan etika dunia yang memandang kekuasaan sebagai privilege.

e. Harapan dan Rekonsiliasi

Etika Kristen tidak sekadar reaktif, tetapi proaktif dalam membawa harapan. Dalam konflik politik, orang Kristen dipanggil menjadi agen rekonsiliasi, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5:18, "...dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami."

7.3 Etika Politik Gereja: Institusi dan Jemaat

Etika politik tidak hanya berlaku pada individu Kristen, tetapi juga pada gereja sebagai institusi.

a. Etika Gereja Institusional

- Tidak memihak partai politik tertentu.
- Tidak menjadikan mimbar sebagai alat kampanye.
- Menjadi fasilitator pendidikan politik yang sehat dan beretika.
- Menolak segala bentuk transaksi kuasa demi kepentingan gereja.

b. Etika Warga Gereja

- Terlibat aktif dalam proses demokrasi dengan kritis dan bijak.
 - Memilih pemimpin berdasarkan nilai dan integritas, bukan suku atau agama.
 - Tidak menyebarkan ujaran kebencian atau informasi palsu.
 - Menjadi terang dan garam dalam lingkungan politiknya.
-

7.4 Tantangan Etika Politik Kristen di Era Digital

Di era digital, etika politik Kristen diuji dalam berbagai bentuk:

- **Politik digital yang brutal:** ujaran kebencian, polarisasi media sosial, dan pembunuhan karakter.
- **Ketidaktahuan digital:** banyak warga gereja tidak memahami etika bersosial media sebagai bagian dari kesaksian iman.
- **Komodifikasi agama secara daring:** gereja ikut menyebarkan narasi politik sektarian melalui platform digital tanpa pertimbangan etis.

Gereja perlu membangun **etika digital kristiani** sebagai bagian dari praksis politiknya. Ini termasuk edukasi jemaat tentang hoaks politik, ujaran kebencian, dan tanggung jawab bermedia sebagai saksi Kristus.

7.5 Tokoh-Tokoh Kristen dan Etika Politik

Beberapa tokoh Kristen telah menjadi teladan etika politik di tengah kekuasaan:

- **Dietrich Bonhoeffer:** menolak kekuasaan Nazi dan akhirnya dihukum mati karena konsistensinya memperjuangkan kebenaran Injil.
 - **Martin Luther King Jr.:** memimpin gerakan hak-hak sipil dengan semangat kasih dan keadilan.
 - **Desmond Tutu:** memperjuangkan rekonsiliasi dan keadilan rasial di Afrika Selatan berdasarkan semangat iman.
 - **Gus Dur (Abdurrahman Wahid):** meski Muslim, ia dihormati banyak gereja karena nilai-nilai etikanya dalam membela minoritas dan pluralitas. Gereja dapat belajar dari etika moral lintas iman.
-

Kesimpulan Bab 7: Iman yang Membimbing Kuasa

Etika politik Kristen bukanlah kompromi antara iman dan kekuasaan, tetapi **penerjemahan iman ke dalam ruang publik**. Ini adalah panggilan untuk hadir di tengah politik—bukan sebagai penjilat kekuasaan, tetapi sebagai suara kenabian yang membawa nilai-nilai Injil: kasih, kebenaran, keadilan, dan pengharapan.

Etika ini tidak hanya relevan untuk para pemimpin gereja, tetapi juga untuk setiap orang Kristen yang terlibat dalam proses politik, baik sebagai pemilih, pengamat, aktivis, atau pejabat publik. Kuasa harus dinavigasi dengan iman yang murni dan komitmen terhadap nilai-nilai Kerajaan Allah.

Bab 8

Menuju Gereja Profetik dan Demokratis

Setelah membahas etika politik Kristen, bab ini mengajak kita melangkah lebih jauh: **bagaimana gereja dapat menjadi kekuatan profetik dan demokratis di tengah masyarakat?** Dalam konteks Indonesia yang majemuk dan dinamis, panggilan gereja bukan hanya menjadi saksi iman, tetapi juga agen transformasi sosial-politik melalui praktik demokrasi dan suara kenabian (prophetic voice).

8.1 Gereja Profetik: Mewarisi Suara Para Nabi

Dalam Perjanjian Lama, para nabi diutus bukan sekadar untuk meramalkan masa depan, melainkan untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan Tuhan di tengah penindasan, korupsi, dan penyembahan berhala. Mereka sering berhadapan langsung dengan para raja, bangsawan, dan pemimpin yang menyeleweng dari kehendak Allah.

Gereja yang profetik adalah gereja yang:

- **Bersuara bagi yang tak bersuara**, termasuk kaum miskin, minoritas, dan korban ketidakadilan.
- **Berani menegur kuasa yang menyimpang**, dengan risiko kehilangan kenyamanan atau dukungan politik.
- **Menjadi pelita moral**, bukan sekadar moralistik, melainkan berbicara dan bertindak secara publik demi keadilan dan kasih.

“Sebab Aku ingin kasih setia, bukan kurban sembelihan, dan pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran.” (Hosea 6:6)

8.2 Gereja dan Demokrasi: Menjadi Garam dalam Sistem

Demokrasi bukan sistem politik yang sempurna, tetapi memberi ruang bagi partisipasi warga, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi. Gereja dalam konteks demokratis seharusnya:

- **Mendorong literasi politik yang sehat di kalangan jemaat.**
- **Membangun nalar kritis umat terhadap praktik kekuasaan yang otoriter atau populis.**
- **Berperan sebagai pengawas sosial (social watchdog)** atas kebijakan publik, terutama yang melanggar keadilan dan martabat manusia.

Gereja dalam Demokrasi:

Aspek	Peran Gereja
Pemilu	Edukasi pemilih, membimbing umat memilih dengan hati nurani
Kebijakan Publik	Menyampaikan kritik konstruktif atas regulasi yang diskriminatif atau tidak adil
Kebebasan Sipil	Membela hak-hak minoritas dan korban intoleransi
Rekonsiliasi Sosial	Menjembatani kelompok yang terpolarisasi, menghadirkan dialog dan perdamaian

8.3 Menuju Gereja yang Berdaya dan Memberdayakan

Agar dapat menjadi gereja profetik dan demokratis, perlu adanya transformasi internal:

- **Pendidikan politik dan teologi publik dalam kurikulum gereja.**
- **Kaderisasi warga gereja sebagai pemimpin masyarakat.**
- **Kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dan lintas agama.**
- **Digitalisasi mimbar gereja untuk menyuarakan keadilan melalui media sosial.**

Gereja tidak boleh hanya menjadi saksi pasif dalam masyarakat, tetapi harus menjadi subjek yang **berdaya dan memberdayakan**. Di sinilah teologi pembebasan, teologi kontekstual, dan teologi digital bisa saling mendukung demi gereja yang relevan dengan zamannya.

8.4 Wajah Gereja Profetik di Indonesia: Contoh Nyata

Gereja profetik tidak hanya hadir melalui mimbar dan liturgi, tetapi juga melalui karya nyata dan suara kenabian di ruang publik. Di Indonesia, sejumlah lembaga dan komunitas telah menjadi wajah nyata dari keterlibatan gereja dalam isu-isu sosial, keadilan, dan demokrasi.

a. Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI)

KWI kerap mengeluarkan pernyataan resmi yang bernas terkait isu-isu kebangsaan, seperti pemilu damai, isu lingkungan hidup, intoleransi, dan keadilan ekonomi. KWI juga aktif dalam advokasi HAM dan pendidikan demokrasi di tingkat akar rumput melalui jaringan keuskupan.

b. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)

PGI secara konsisten menyuarakan keprihatinan atas ketidakadilan sosial, pelanggaran kebebasan beragama, radikalisme, serta perusakan lingkungan. Melalui lembaga-lembaga internalnya, PGI turut mendorong pemberdayaan perempuan, inklusi disabilitas, dan ekoteologi.

c. Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI)

PWGI hadir sebagai **komunitas jurnalis gereja yang membawa suara kenabian melalui pena dan media**. Di tengah gelombang informasi digital dan polarisasi berita, PWGI menjalankan peran strategis sebagai:

- **Insan pers gerejawi yang independen dan bermartabat.**
- **Pewarta keadilan dan suara kaum marginal**, terutama mereka yang kerap dibungkam oleh kekuasaan atau tidak memiliki akses pada media arus utama.
- **Pelaku jurnalisme profetik** (prophetic journalism), yaitu jurnalisme yang tidak hanya informatif tetapi juga transformatif, menelanjangi ketidakadilan dan mengadvokasi nilai-nilai kasih, kejujuran, dan kebenaran.
- **Pemersatu lintas denominasi dan iman** dalam semangat damai dan moderasi beragama.

PWGI membuktikan bahwa **media gereja bukan hanya media internalisasi iman**, tetapi juga **instrumen publik untuk memperjuangkan keadilan sosial dan demokrasi bermoral**.

d. GusDurian & Jaringan Lintas Iman

Meskipun berbasis pada warisan tokoh Muslim pluralis, komunitas ini telah banyak berkolaborasi dengan gereja dan lembaga Kristen dalam mengadvokasi pluralisme, keberagaman, dan perlindungan kelompok rentan. Ini menunjukkan bahwa kerja profetik tidak harus eksklusif, tetapi bisa bersifat lintas batas iman.

e. Gereja Lokal yang Bergerak

Banyak gereja lokal di Indonesia yang mulai menjalankan peran profetik melalui:

- Klinik gratis bagi masyarakat miskin.
- Layanan hukum untuk korban ketidakadilan.
- Pendidikan alternatif berbasis nilai Kristiani.
- Media digital dan siaran live streaming yang menyuarakan pesan-pesan transformasional, bukan hanya liturgi ritualistik.

Tambahan ini menegaskan bahwa **fungsi profetik gereja dapat diekspresikan melalui berbagai saluran**, termasuk media massa dan jurnalisme. Dengan memasukkan PWGI, pembaca mendapat gambaran yang lebih luas dan konkret tentang bagaimana gereja tidak hanya berkhotbah di mimbar, tetapi juga **berbicara melalui tulisan dan suara yang bergema di ruang publik digital dan sosial**.

8.5 Tantangan dan Harapan

Tantangan:

- Resistensi internal gereja terhadap isu-isu sosial karena dianggap “bukan urusan gereja”.
- Ketakutan akan kehilangan donatur atau dukungan politis.
- Tekanan dari penguasa agar gereja “netral” secara keliru.
- Kurangnya kesadaran digital gereja terhadap opini publik dan pengaruh media.

Harapan:

- Munculnya teolog dan aktivis Kristen yang berani menyuarakan keadilan.
- Gereja bertransformasi menjadi ruang diskusi publik dan dialog antarwarga.
- Penggunaan media digital sebagai alat kesaksian profetik.

Kesimpulan Bab 8: Gereja di Persimpangan Zaman

Di era globalisasi, digitalisasi, dan kemajemukan, gereja ditantang untuk melampaui tembok-tembok liturgis dan tampil sebagai **komunitas yang hidup, aktif, dan profetik**. Keterlibatan dalam demokrasi bukan bentuk “berpolitik praktis” yang kotor, melainkan **kesaksian Injil di tengah dunia nyata**.

Gereja yang profetik dan demokratis adalah gereja yang setia pada Injil, tetapi tidak membisu terhadap ketidakadilan. Ia berjalan bersama umat, berjuang bagi yang lemah, dan menjadi cahaya di tengah kegelapan politik zaman ini.

Bab 9

Kesimpulan dan Rekomendasi Teologis-Praktis

9.1 Kesimpulan Umum: Menjawab Pertanyaan "Bolehkah Gereja Berpolitik?"

Pertanyaan “bolehkah gereja berpolitik?” bukan sekadar pertanyaan normatif, tetapi merupakan pergumulan yang menyentuh jantung relasi antara iman dan dunia. Setelah menelaah dimensi politik dari sisi ideal, kekuasaan, hingga moralitas, serta memeriksa makna gereja sebagai komunitas iman dan saksi Kristus, maka jawabannya tidak bisa dikotomis: “boleh” atau “tidak boleh.” Jawaban tersebut harus dihadirkan dalam nuansa teologis yang kritis dan kontekstual.

Gereja boleh dan bahkan perlu terlibat dalam politik, sepanjang keterlibatan tersebut:

- Tidak dimotivasi oleh hasrat kekuasaan atau dominasi ideologis.
- Berakar dalam panggilan profetik: menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kasih.
- Menjaga integritas iman Kristiani dalam menghadirkan suara kenabian di tengah dunia.

Namun, gereja juga harus **menghindari jebakan politik praktis yang transaksional dan partisan**, yang berpotensi mencemari kesaksian injil dan merusak kesatuan tubuh Kristus. Gereja bukan partai politik, dan tidak boleh menjadi alat politik golongan manapun.

9.2 Pilar-pilar Teologis yang Mendukung Keterlibatan Gereja dalam Politik

Berdasarkan eksplorasi teologis dan historis, terdapat beberapa pilar utama yang mendukung gagasan keterlibatan gereja dalam ranah politik secara sehat dan bertanggung jawab:

- **Imago Dei dan Martabat Manusia:** Politik menyentuh hak dan harkat manusia ciptaan Allah. Gereja yang menghormati Imago Dei tidak boleh diam terhadap ketidakadilan struktural.
- **Amanat Budaya dan Amanat Agung:** Allah memanggil umat-Nya untuk mengelola bumi (Kej. 1:28) dan memberitakan Injil (Mat. 28:19-20). Kedua amanat ini bersifat saling melengkapi dan tidak saling meniadakan.
- **Kesaksian Profetik:** Gereja dipanggil bukan hanya untuk menenangkan hati, tetapi juga menggugah nurani masyarakat dan para penguasa.
- **Kerajaan Allah sebagai Visi Politik Alternatif:** Gereja dipanggil menjadi representasi nilai-nilai Kerajaan Allah—kasih, damai, dan keadilan—yang melampaui sistem politik duniawi.

9.3 Rekomendasi Praktis bagi Gereja dan Pelayanannya

a. Menjadi Gereja yang Kritis, Bukan Partisan

Gereja harus mampu menjaga *jarak kritis* terhadap kekuasaan. Dukungan kepada calon tertentu atau afiliasi pada partai tertentu harus dihindari dalam kapasitas institusional. Namun, ini tidak berarti gereja harus diam. Suara moral tetap harus dikumandangkan, tanpa menjadi alat politik.

b. Membina Warga Gereja sebagai Warga Negara yang Cerdas

Pendidikan politik etis perlu menjadi bagian dari pelayanan gereja. Gereja bisa menyelenggarakan diskusi publik, seminar etika politik Kristen, hingga kelas warga negara yang menekankan tanggung jawab iman dalam kehidupan berbangsa.

c. Mengembangkan Jurnalisme Profetik dan Media Gerejawi

Media gereja harus menjadi alat profetik. Seperti yang ditunjukkan oleh *Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI)*, jurnalisme profetik bisa menjadi sarana ampuh untuk menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan, terutama bagi mereka yang dibungkam oleh sistem.

d. Menjadi Pelayan di Tengah Masyarakat, Bukan Penguasa

Keterlibatan dalam politik hendaknya dilakukan dalam semangat pelayanan, bukan kekuasaan. Gereja hadir bukan untuk mengambil-alih negara, tetapi menjadi garam dan terang yang membimbing arah kehidupan berbangsa ke jalan keadilan.

e. Mengembangkan Etika Politik Kristen sebagai Spirit Pergerakan

Etika politik Kristen yang mengedepankan kejujuran, belas kasih, keberanian, dan pengharapan harus menjadi identitas warga gereja yang masuk dalam dunia politik. Gereja tidak hanya mendidik pemilih yang cerdas, tetapi juga calon pemimpin yang bermoral dan rendah hati.

9.4 Penutup: Gereja sebagai Suara Nurani Publik

Di tengah krisis moral dan polarisasi politik global, gereja dipanggil bukan untuk berdiam diri, tetapi untuk berdiri teguh sebagai **komunitas profetik, penjaga nurani bangsa, dan pelayan kemanusiaan**.

Dalam terang iman kepada Kristus, gereja dapat menghidupi peran politiknya dengan kesadaran bahwa **politik bukanlah panggung kotor yang harus di jauhi**, tetapi **arena pelayanan dan kesaksian Injil**. Dunia tidak membutuhkan gereja yang diam karena takut, tetapi gereja yang bersuara karena kasih.

DAFTAR PUSTAKA

1. Augustine, St. *The City of God*. New York: Penguin Books, 2003.
2. Barth, Karl. *Community, State, and Church*. Eugene: Wipf and Stock, 2004.
3. Bonhoeffer, Dietrich. *Ethics*. New York: Simon & Schuster, 1995.
4. Calvin, John. *Institutes of the Christian Religion*. Louisville: Westminster John Knox Press, 2006.
5. Gutierrez, Gustavo. *A Theology of Liberation*. Maryknoll: Orbis Books, 1988.
6. Hauerwas, Stanley. *The Peaceable Kingdom: A Primer in Christian Ethics*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1983.
7. Kuyper, Abraham. *Lectures on Calvinism*. Grand Rapids: Eerdmans, 1931.
8. Moltmann, Jürgen. *Theology of Hope*. Minneapolis: Fortress Press, 1993.
9. Niebuhr, Reinhold. *Moral Man and Immoral Society*. Louisville: Westminster John Knox Press, 2005.
10. Rendra, W.S. *Sastra, Politik, dan Moral*. Jakarta: Gramedia, 1990.
11. Siregar, Bakti. "Gereja dan Politik: Tinjauan Teologis dalam Konteks Indonesia." *Jurnal Teologi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, 2022.
12. Tillich, Paul. *Love, Power, and Justice: Ontological Analyses and Ethical Applications*. Oxford: Oxford University Press, 1954.
13. Volf, Miroslav. *A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good*. Grand Rapids: Brazos Press, 2011.
14. Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
15. Yoder, John Howard. *The Politics of Jesus*. Grand Rapids: Eerdmans, 1994.
16. Lembaga Interkultur dan Antar Agama (Leimena). "Gereja dan Politik." www.leimena.org. Diakses 2025.
17. PWGI (Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia). *Arsip dan Dokumentasi Suara Profetik Gereja, 2020–2025*.
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
20. Alkitab Terjemahan Baru. Jakarta: LAI, 2002.

GLOSARIUM

Amanat Agung – Perintah Yesus Kristus kepada murid-murid-Nya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia (Matius 28:19-20).

Amanat Budaya – Mandat Allah kepada manusia untuk mengelola bumi dan segala isinya dengan bijak (Kejadian 1:28).

Ecclesia – Istilah Yunani untuk "gereja", merujuk pada komunitas orang yang dipanggil keluar dari dunia untuk menjadi umat Allah.

Etika Politik Kristen – Prinsip-prinsip moral berdasarkan ajaran Yesus Kristus dalam mengarahkan perilaku warga gereja dalam kehidupan politik.

Gereja Profetik – Gereja yang menjalankan perannya sebagai suara kenabian dalam masyarakat, menegur ketidakadilan dan menyuarakan kebenaran.

Jurnalisme Profetik – Praktik jurnalistik yang berfungsi menyuarakan keadilan sosial, memperjuangkan kaum marginal, dan bertindak sebagai penjaga nurani publik.

Kerajaan Allah – Konsep teologis yang merujuk pada pemerintahan Allah yang penuh damai, kasih, dan keadilan, baik secara spiritual maupun konkret.

Machtspolitik – Politik kekuasaan; pendekatan politik yang mengutamakan dominasi dan kontrol daripada nilai dan etika.

Partisan – Keberpihakan terhadap partai atau kelompok politik tertentu secara aktif, biasanya dalam konteks politik praktis.

Teologi Kontekstual – Pendekatan teologis yang berusaha memahami dan menerapkan ajaran iman dalam konteks sosial, budaya, dan politik tertentu.

PROFIL PENULIS

Dharma Leksana, S.Th., M.Si.



Teolog | Wartawan
Senior | Pegiat
Media Digital
Gerejawi

Dharma Leksana, S.Th., M.Si., adalah seorang teolog, wartawan senior, sekaligus pegiat komunikasi digital dalam konteks pelayanan gerejawi. Ia

menyelesaikan studi Sarjana Teologi (S.Th.) di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta dan melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Sosial (M.Si.) dengan spesialisasi pada media dan masyarakat.

Sebagai tokoh yang menjembatani antara dunia teologi, media digital, dan transformasi sosial, Dharma memiliki rekam jejak panjang dalam membangun komunikasi iman yang kontekstual, transformatif, serta responsif terhadap tantangan zaman digital.

Posisi dan Jabatan

- Pendiri & Ketua Umum – Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI)
- Komisaris Utama – PT. Dharma Leksana Media Group (DHARMAEL)
- Direktur – PT. Berita Siber Indonesia Raya (PT BASERIN)
- Komisaris – PT. Berita Kampus Mediatama
- Komisaris – PT. Media Kantor Hukum Online
- CEO & Pendiri – Marketplace Tokogereja.com
- Ketua Umum – Yayasan Berita Siber Indonesia
- Direktur – PT. Untuk Indonesia Seharusnya

Bolehkah Gereja Berpolitik? Perspektif Teologis dan Praktis oleh **Dharma Leksana, S.Th., M.Si**

Kiprah Digital Gerejawi

Dharma merupakan pelopor dalam pendirian berbagai media digital Kristen yang kini aktif memberitakan, mengedukasi, serta memperjuangkan nilai-nilai iman dalam ruang digital, di antaranya:

- <https://wartagereja.co.id>
- <https://beritaoikoumene.com>
- <https://teologi.digital>
- <https://marturia.digital>
- ...dan puluhan media lainnya yang bernaung di bawah PT DHARMAEL.

Karya-karya Buku Pilihan

- Mencari Wajah Allah di Belantara Digital: <https://online.fliphtml5.com/syony/kqji/>
- Jejak Langkah Misiologi Gereja Perdana: <https://online.fliphtml5.com/syony/mjax/>
- Agama, AI dan Pluralisme: <https://online.fliphtml5.com/syony/ralp/>
- Fenomenologi Edmund Husserl di Era Digital: <https://online.fliphtml5.com/syony/ueqp/>
- Yesus di Dunia Maya: <https://online.fliphtml5.com/syony/orks/>
- Algoritma Tuhan: Refleksi tentang Sang Programmer Alam Semesta: <https://online.fliphtml5.com/syony/tlwq/>
- Buku Trilogi Kerajaan Allah Digital: <https://online.fliphtml5.com/syony/uewb/>

(→ Lihat daftar lengkap 40+ buku: LAMPIRAN atau tautan digital FlipHTML5)

Kutipan Penulis

"Misi Kekristenan hari ini tidak lagi sekadar berpijak pada altar, tetapi juga harus menjelajah algoritma; sebab Allah pun hadir di belantara digital."

— Dharma Leksana, S.Th., M.Si.

Kontak & Jejak Digital

- Email: dharmaleksana@gmail.com
- Marketplace: <https://www.tokogereja.com>
- PWGI: <https://www.pwgi.id>